



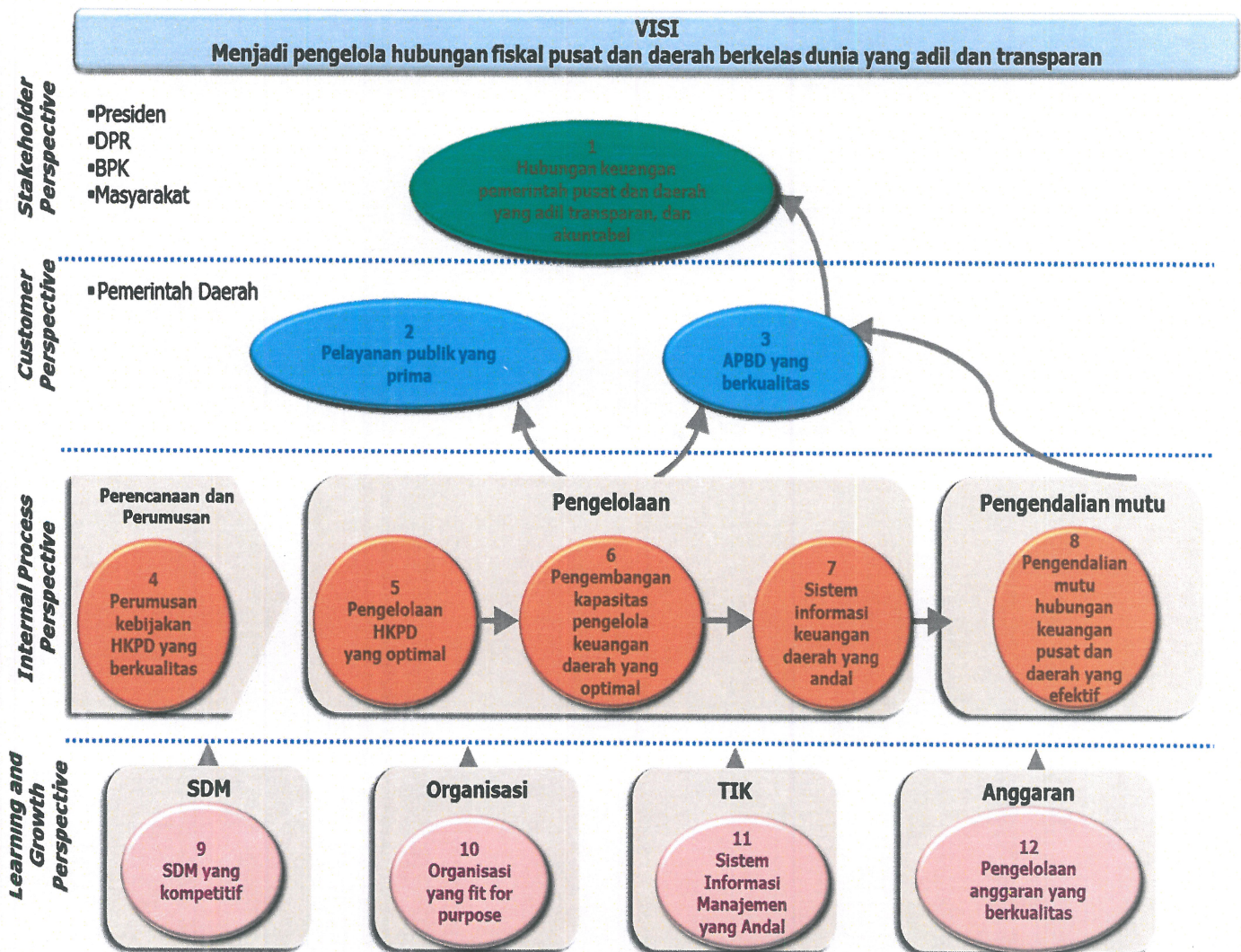
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 7.1/KK/2018  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2018**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil, transparan, dan akuntabel	1a-CP	Indeks pemerataan kemampuan keuangan antardaerah	0,58
		1b-N	Rasio PDRD terhadap PDRB	2,65
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJPK	4,40 (skala 5)
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas	3a-N	Persentase daerah yang memiliki APBD yang berkualitas	90%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	4a-N	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	100%
5.	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal	5a-N	Persentase efektivitas pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	100%
		5b-N	Persentase pencapaian output dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	100%
		5c-CP	Persentase belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Dana Desa untuk kemiskinan terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	75%
6.	Pengembangan kapasitas pengelola keuangan daerah yang optimal	6a-N	Persentase jumlah daerah yang mengikuti bimbingan teknis keuangan daerah dari seluruh daerah yang kinerja pengelolaan keuangannya masih rendah	28,13%
		6b-N	Persentase pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)	38,33%
7.	Sistem informasi keuangan daerah yang andal	7a-N	Persentase pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi	40%
8.	Pengendalian mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang efektif	8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	24,71%
		8b-N	Persentase kepatuhan daerah terhadap pemenuhan kewajiban pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)	97,5%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8c-N Persentase daerah yang memiliki kas wajar	90%
9.	SDM yang kompetitif	9a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%
		9b-N Persentase pelaksanaan program <i>internship</i> dan <i>secondment</i> tahap II	50%
10.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-CP Persentase implementasi inisiatif RBTK	92%
		10b-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		10c-CP Indeks persepsi integritas	85
11.	Sistem manajemen informasi yang andal	11a-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,35%
		11b-N Persentase pengembangan aplikasi internal tepat waktu	100%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan layanan dana perimbangan	Rp9.408.455.870,-
2. Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan sistem informasi keuangan daerah	Rp3.617.629.190,-
3. Perumusan kebijakan dan pembinaan pendapatan dan kapasitas keuangan daerah	Rp5.126.311.228,-
4. Perumusan kebijakan dan pembinaan pembiayaan dan transfer non dana perimbangan	Rp17.908.394.417,-
5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan	Rp64.814.963.465,-

Jakarta, September 2018

Menteri Keuangan,



Sri Mulyani Indrawati

PNS yang dinilai,



Astera Primanto Bhakti  
NIP. 19680120 199201 1 003



**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil, transparan, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks pemerataan kemampuan keuangan antardaerah				-	-	0,58	0,58
1b-N	Rasio PDRD terhadap PDRB				-	-	2,65	2,65
2.	Pelayanan publik yang prima							
2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJPK				-	-	4,40 (skala 5)	4,40 (skala 5)
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas							
3a-N	Persentase daerah yang memiliki APBD yang berkualitas				-	-	90%	90%
4.	Perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas							
4a-N	Persentase penyelesaian perumusan kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas				100%	100%	100%	100%
5.	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang optimal							
5a-N	Persentase efektivitas pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)				-	-	100%	100%
5b-N	Persentase pencapaian output dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)				-	-	100%	100%
5c-CP	Persentase belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dana desa untuk kemiskinan terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)				-	-	75%	75%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6.	Pengembangan kapasitas pengelola keuangan daerah yang optimal							
6a-N	Persentase jumlah daerah yang mengikuti bimbingan teknis keuangan daerah dari seluruh daerah yang kinerja pengelolaan keuangannya masih rendah				-	-	28,13%	28,13%
6b-N	Persentase pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)				28,33%	28,33%	38,33%	38,33%
7.	Sistem informasi keuangan daerah yang andal							
7a-N	Persentase pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi				-	40%	40%	40%
8.	Pengendalian mutu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang efektif							
8a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti				-	-	24,71%	24,71%
8b-N	Persentase kepatuhan daerah terhadap pemenuhan kewajiban pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)				-	97,5%	97,5%	97,5%
8c-N	Persentase daerah yang memiliki kas wajar				-	90%	90%	90%
9.	SDM yang Kompetitif							
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan				-	100%	100%	100%
9b-N	Persentase pelaksanaan program <i>internship</i> dan <i>secondment</i> tahap II				-	50%	50%	50%

N



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
10a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK				9%	9%	67%	67%
10b-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK				100%	100%	-	100%
10c-CP	Indeks persepsi integritas				-	-	85	85
11.	Sistem manajemen informasi yang andal							
11a-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK				0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
11b-N	Persentase pengembangan aplikasi internal tepat waktu				-	-	100%	100%
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12b-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran				18,16%	18,16%	43,16%	43,16%

Jakarta, September 2018

PNS yang dinilai,



N Astera Primanto Bhakti

NIP. 19680120 199201 1 003 H

N H



## INISIATIF STRATEGIS

### DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
1.	Persentase efektivitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	Penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK fisik antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta peningkatan capaian hasil sesuai prioritas nasional dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Juli s.d. Desember 2018	Dit. Dana Perimbangan	Rp1.837.660.000,-
		Percepatan reformasi pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terselesaikannya regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Terlaksananya fasilitasi bimtek pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3. Penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</li> </ol>	Juli s.d. Desember 2018	Seluruh Unit Eselon II	Rp3.472.138.227,-

Jakarta,      September 2018

PNS yang dinilai,



N    Astera Primanto Bhakti  
NIP. 19680120 199201 1 003



## Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Sri Mulyani Indrawati	1	Nama	Astera Primanto Bhakti
2	NIP	-	2	NIP	19680120 199201 1 003
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4	Jabatan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Mencapai tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah	-	0,58	100	6 bulan	-
2.	Mencapai tingkat rasio PDRD terhadap PDRB	-	2,65	100	6 bulan	-
3.	Memenuhi kepuasan publik atas layanan DJPK	-	4,40 (skala 5)	100	6 bulan	-
4.	Mencapai tingkat daerah yang memiliki APBD yang berkualitas	-	90%	100	6 bulan	-
5.	Menyelesaikan perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berkualitas	-	100%	100	6 bulan	-
6.	Mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan efektif	-	100%	100	6 bulan	-
7.	Mencapai tingkat output dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	-	100%	100	6 bulan	-
8.	Mencapai tingkat Belanja Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Dana Desa untuk kemiskinan terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	-	75%	100	6 bulan	-
9.	Memberikan bimbingan teknis keuangan daerah kepada sejumlah daerah yang kinerja pengelolaan keuangannya masih rendah	-	28,13%	100	6 bulan	-
10.	Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)	-	38,33%	100	6 bulan	-
11.	Melakukan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi	-	40%	100	6 bulan	-
12.	Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	-	24,71%	100	6 bulan	-

~ H



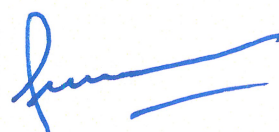
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
13.	Mencapai tingkat kepatuhan daerah terhadap pemenuhan kewajiban pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)	-	97,5%	100	6 bulan	-
14.	Mencapai tingkat daerah yang memiliki kas wajar	-	90%	100	6 bulan	-
15.	Mencapai tingkat pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	100%	100	6 bulan	-
16.	Melaksanakan program <i>internship</i> dan <i>secondment</i> tahap II	-	50%	100	6 bulan	-
17.	Mengimplementasikan inisiatif RBTk	-	67%	100	6 bulan	-
18.	Mencapai tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	100%	100	6 bulan	-
19.	Mecapai tingkat indeks persepsi integritas	-	85	100	6 bulan	-
20.	Meminimalisasi tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	-	0,35%	100	6 bulan	-
21.	Mengembangkan aplikasi internal tepat waktu	-	100%	100	6 bulan	-
22.	Mencapai tingkat kualitas pelaksanaan anggaran	-	43,16%	100	6 bulan	-

Jakarta, September 2018

Menteri Keuangan,

  
Sri Mulyani Indrawati

PNS yang dinilai,

  
Astera Primanto Bhakti  
NIP. 19680120 199201 1 003